



Peraturan Bupati Bandung

# Perubahan Renstra PD

2021-2026

BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG  
Kabupaten Bandung





# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## BAPPERIDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
Jl. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911  
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bakabbdg@yahoo.com  
[Website BAPPERIDA.bandungkab.go.id](http://Website BAPPERIDA.bandungkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 000.7.2 / 09 / SEKRET  
LAMPIRAN : 1 (satu)

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

#### KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BAPPERIDA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Keputusan Menteri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
  14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023;

- KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Tahun 2021-2026 ditetapkan.

Ditetapkan : di Soreang  
Pada tanggal : 03 Januari 2024

  
KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN BANDUNG,  
**Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M. Sc**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19671110 199303 1 012



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 000.7.2/09/SEKRET  
TANGGAL : 03 Januari 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA  
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPERIDA  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026**

**Jabatan dalam Tim**

**Nama/Jabatan**

Pengarah : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung  
Ketua : Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Bandung  
Anggota :  
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;  
2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;  
3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;  
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;  
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;  
6. Perencana Ahli Muda pada Penyusunan Program;  
7. Kasubbagian Umum dan Kepegawaian;  
8. Kasubbagian Keuangan;  
9. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;  
10. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi;  
11. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan;  
12. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;  
13. Analis Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN BANDUNG,  
  
**Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M. Sc**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19671110 199303 1 012

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 000.7.2/09 / SEKRET  
TANGGAL : 03 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA  
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPERIDA  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026**

**1. PENGARAH:**

- Memberikan arahan, masukan, dan saran kepada Tim dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Menetapkan rumusan kebijakan dalam Penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

**2. KETUA:**

- Melaksanakan pengendalian terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala BAPPERIDA;
- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**3. ANGGOTA:**

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra BAPPERIDA sebelumnya;
- Berpartisipasi secara aktif dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan pembahasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan umum, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan pada Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Menelaah dan mengoreksi isi dan substansi Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung 2021-2026;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Bandung;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

- **Melaksanakan penyempurnaan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung;**
- **Menyesuaikan dokumen Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan;**
- **Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Kedua Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, BAPPERIDA Kabupaten Bandung mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder*.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misinya.

Soreang, Januari 2024

**KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN BANDUNG,**

**Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671110 199303 1 012



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud & Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-21
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	III-4
3.4. Telaahan Renstra Renstra Provinsi .....	III-6
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-8
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-10
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .	IV-2
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	V-1
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	VI-1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	VII-1
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	VIII-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan pada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara spesifik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan RPJMD Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021-2026 serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa BAPPERIDA sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas dan amanat tersebut, maka disusun Perubahan Renstra untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan RPJMD Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Adanya dinamika perubahan kebijakan baik dalam lingkup nasional dalam hal urusan perencanaan maupun keuangan menjadi dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang didalamnya memuat perubahan indikator subkegiatan beserta satuan yang menjadi dasar normatif dalam penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah meliputi perubahan indikator subkegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta penyesuaian target selama dua tahun kedepan sisa periode Renstra Tahun 2021-2026. Perubahan indikator subkegiatan tersebut juga berimplikasi pada penyesuaian indikator kegiatan pada dokumen Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021-2026. Selain itu adanya tantangan dan peluang selama periode Renstra Tahun 2021 sampai dengan 2023 juga menjadi perhatian dalam perumusan perubahan Renstra ini. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renstra BAPPERIDA perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menjawab tantangan dan mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya tertangani pada tiga tahun periode awal Renstra melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan sisa periode Tahun 2025 sampai dengan 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahkan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 (Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA adalah melakukan penyesuaian perubahan indikator subkegiatan beserta target berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu sisa dua tahun kedepan sehingga dapat menghasilkan perencanaan konsisten, sinergis dan akuntabel serta dapat mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja BAPPERIDA.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA**

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya BAPPERIDA, Kinerja Pelayanan BAPPERIDA, Tantangan dan peluang

Pengembangan Pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPERIDA, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Bandung Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VIII : PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021 mengenai Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah.

Selanjutnya, tugas dan fungsi pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Tugas-tugas perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh BAPPERIDA yang dipimpin oleh pejabat eselon IIB dengan susunan organisasi sebagai berikut:

##### 1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan, membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan,
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
- penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Perencana;
- d. Pelaksana.

## 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana);
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:

- a. Perencana;
- b. Pelaksana.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya  
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:



- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana);
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya, membawahkan:

- a. perencana; dan
- b. Pelaksana.

#### 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana);

- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, dibantu oleh:

- a. Perencana; dan
- b. Pelaksana.

#### 6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Data dan Informasi Pembangunan Daerah);
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi Perencanaan

Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;

- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:

- a. Perencana; dan
- b. Pelaksana.

#### 7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas pengembangan riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

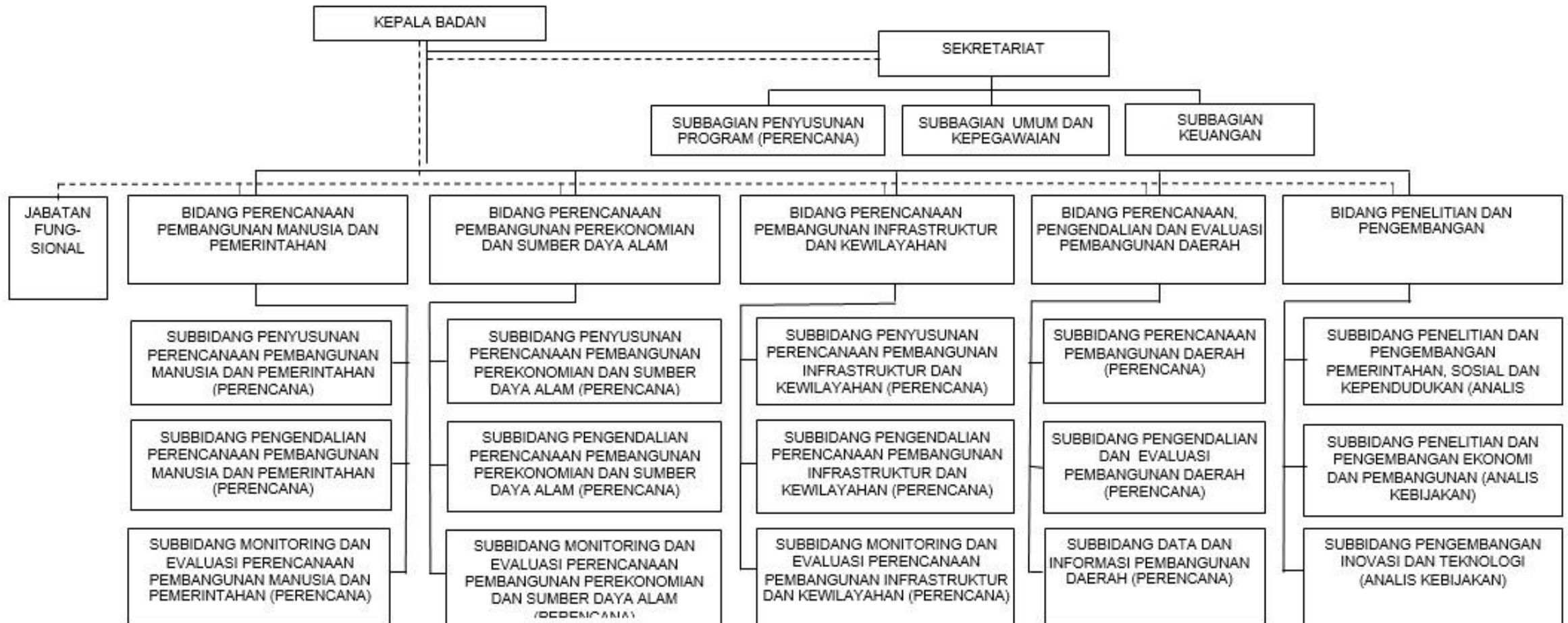
- menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan riset dan inovasi daerah;
- menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang riset dan inovasi daerah;
- menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang riset dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

- a. Analis Kebijakan;
- b. Pelaksana.



**Gambar 2.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi BAPPERIDA**



Secara umum BAPPERIDA merupakan unit organisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu BAPPERIDA juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Dalam kegiatan Musrenbang, BAPPERIDA mengkoordinir proses perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga kabupaten yakni dalam proses Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh BAPPERIDA.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang ada di BAPPERIDA Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

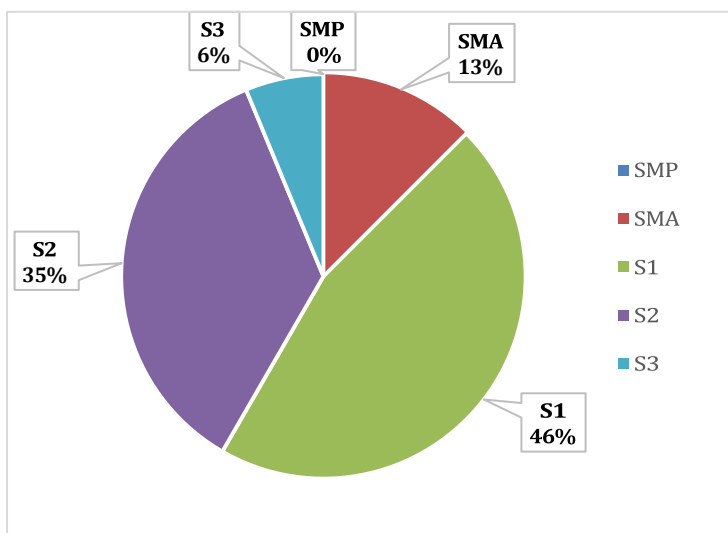
### 2.2.1. Sumber daya manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada Tahun 2023.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	SMP	0	0
2	SMA	6	12,5
3	S1	22	45,83
4	S2	17	35,42
5	S3	3	6,25
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber : Kepegawaian BAPPERIDA Tahun 2023



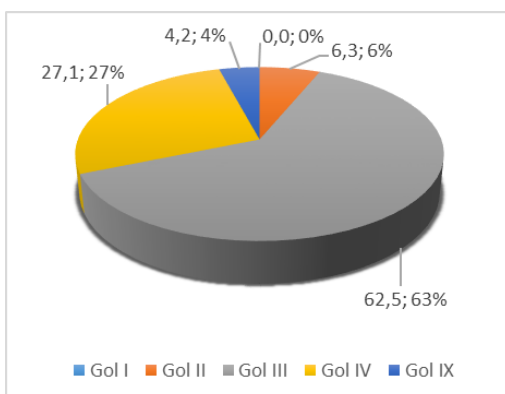
Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SMP sebesar 0%, SMA sebesar 12,5%, S1 sebesar 46%, S2 sebesar 35%, dan S3 sebesar 35%.

Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023**

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	Gol I	0	0,0
2	Gol II	3	6,3
3	Gol III	30	62,5
4	Gol IV	13	27,1
5	Gol IX	2	4,2
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kepegawaian BAPPERIDA Tahun 2023



Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 6,3%, Golongan III sebanyak 62,5%; Golongan IV sebanyak 27,1% dan Gplongan IX sebanyak 4,2%. Melihat komposisi tersebut, pagawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung didominasi oleh golongan III.

Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung**  
**Berdasarkan Eselon Tahun 2023**

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	Eselon II	1	2,1
2	Eselon III	6	12,5
3	Eselon IV	2	4,2
4	JFT	22	45,8
5	JFU	17	35,4
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kepegawaian BAPPERIDA 2023

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung

BAPPERIDA Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas sebesar 1.480 m<sup>2</sup>, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 11 unit dan roda 2 sebanyak 16 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 28 unit laptop, 20 unit komputer PC dan 8 unit komputer tablet dalam



kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern BAPPERIDA maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. BAPPERIDA memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas  $\pm$  100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas perangkat audio visual dan proyektor yang baik. Di lantai 2 (dua) pun disediakan 1 (satu) ruang rapat biasa dengan meja kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 4 (empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan baik dan nyaman.

### **2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Berikut indikator kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4 (Tabel T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPERIDA**  
**Kabupaten Bandung**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran				94,55	92	93	96,2	96,50	97,00	94,55	95,54	95,96	96,76	100	100,00	100,00	103,85	103,18	100,58	103,63	103,09
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD				91,11	93	94	95,70	96	96,50	91,11	95,45	95,59	98,04	94,72	99,97	100,00	102,63	101,69	102,45	98,67	103,60
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA				B (69)	B (67)	B (68)	BB (78)	BB (80)	A (81)	B (69)	BB (75,54)	BB (77,33)	A (81,72)	A (82,78)	A (83)	100,00	112,74	113,72	104,76	103,47	102,46
5	Persentase aset dalam kondisi baik				90,62	91	92	93,70	94	94,50	90,62	94,50	93,57	99,48	98,64	96,30	100,00	103,85	101,71	106,17	104,94	101,90

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Lima indikator tersebut merupakan indikator hasil Renstra Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hampir semua indikator kinerja telah memenuhi target bahkan ada yang capaiannya melebihi target. Namun pada indikator “presentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan dalam RKPD” pada tahun 2020 hanya mencapai 94,72% dari target 96% atau dengan rasio capaian sebesar 98,67%. Hal ini disebabkan oleh jumlah usulan DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 sebanyak 6274 usulan dari target 6624 usulan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. kurangnya pemahaman sumber daya aparatur pemerintahan desa atau kecamatan dalam hal mekanisme penentuan daftar prioritas kewenangan suatu program atau kegiatan;
- b. kurang selarasnya daftar skala prioritas dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti RTRW, RPJMD dan RPJPD;
- c. tidak adanya evaluasi dari musrenbangcam/kelurahan dari tahun sebelumnya mengenai usulan Daftar Skala Prioritas (DSP);
- d. adanya perubahan peraturan/perundang-undangan atau baru pada tahun berjalan yang mempengaruhi perencanaan usulan DSP; dan
- e. basis data mengenai DSP yang dimiliki oleh kecamatan belum terorganisir dengan baik.

Berbeda dengan capaian tahun 2020, pada tahun 2021 rasio capaian indikator kinerja sudah melebihi 100%. Hal ini berarti semua capaian kinerja telah melebihi dari yang ditargetkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya penerapan aplikasi Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan bisa selaras dan konsisten sampai dengan tahap penganggaran. Jika dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada gap atau kesenjangan capaian pelayanan pada BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pelayanan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor pendukung internal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Tahun 2016-2021 diantaranya yaitu :

- a. komitmen dan sinergitas antar bidang di BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu;
- b. sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di BAPPEDA Kabupaten Bandung sudah memadai;
- c. keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah;
- d. semua proses perencanaan target kinerja sudah sesuai dengan alur aturan yang berlaku dan tepat waktu; dan
- e. pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan baik dan terbuka.

Adapun faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu:

- a. sinergitas antara BAPPEDA dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan; dan
- b. adanya aplikasi *e-planning* (Simda Integrated) dan SIPD sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi.

Walaupun capaian kinerja pelayanan BAPPEDA sudah baik dan tidak ada *gap* atau kesenjangan tiap tahunnya namun selama rentang tahun 2017-2021 terdapat kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut. Beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

- a. adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan;
- b. sumber daya aparatur khususnya perencana yang masih terbatas dan belum tersebar secara merata;
- c. inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masih terkendala faktor ego sektoral;
- d. aplikasi perencanaan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak *trial and error* dalam penggunaannya sehingga belum optimal dalam implementasinya; dan
- e. manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum optimal.

Jika dilihat dari analisis capaian kinerja BAPPEDA tahun 2017-2021 di atas maka dapat dilihat bahwa BAPPEDA memiliki potensi yang baik untuk melaksanakan kinerja pada periode selanjutnya. Hal ini berdasarkan rerata nilai capaian untuk setiap indikator sudah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi (*e-Monev*).



**Tabel 2.5 (Tabel T-C.24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPERIDA**  
**Kabupaten Bandung**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Tw.1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (TW.)	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA</b>	<b>15.838.744.308</b>	<b>18.482.997.700</b>	<b>17.077.312.937</b>	<b>21.048.777.482</b>	<b>18.045.194.907,59</b>	<b>23.148.737.409</b>	<b>13.885.186.511</b>	<b>16.040.121.459</b>	<b>15.450.127.404</b>	<b>19.918.129.210</b>	<b>16.745.685.720</b>	<b>3.624.519.356</b>	<b>87,67</b>	<b>86,78</b>	<b>90,47</b>	<b>94,63</b>	<b>92,80</b>	<b>15,66</b>	<b>933.147.941,80</b>	<b>- 2.483.120.421</b>
<b>I BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.558.978.308</b>	<b>6.894.536.000</b>	<b>7.135.627.000</b>	<b>12.337.629.000</b>	<b>11.516.898.409</b>	<b>11.908.225.363</b>	<b>5.262.367.025</b>	<b>5.858.100.081</b>	<b>6.594.829.592</b>	<b>11.648.115.128</b>	<b>10.780.506.790</b>	<b>2.781.096.895</b>	<b>80,23</b>	<b>84,97</b>	<b>92,42</b>	<b>94,41</b>	<b>93,61</b>	<b>23,35</b>	<b>1.002.737.873</b>	<b>- 615.400.637</b>
Belanja Pegawai	6.558.978.308	6.894.536.000	7.135.627.000	12.337.629.000	11.516.898.409	11.908.225.363	5.262.367.025	5.858.100.081	6.594.829.592	11.648.115.128	10.780.506.790	2.781.096.895	80,23	84,97	92,42	94,41	93,61	23,35	1.002.737.873	- 615.400.637
<b>II BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.279.766.000</b>	<b>11.588.461.700</b>	<b>9.941.685.937</b>	<b>8.711.148.482</b>	<b>6.528.296.498,95</b>	<b>11.240.512.046,00</b>	<b>8.622.819.486,00</b>	<b>10.182.021.378</b>	<b>8.855.297.812</b>	<b>8.270.014.082</b>	<b>5.965.178.930</b>	<b>843.422.461</b>	<b>92,92</b>	<b>87,86</b>	<b>89,07</b>	<b>94,94</b>	<b>91,37</b>	<b>7,50</b>	<b>- 69.589.931</b>	<b>- 1.867.719.783</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.465.029.050	1.700.173.700	958.773.880	1.612.462.216	1.803.051.158,30	1.827.724.626,00	1.428.655.544	1.588.888.254	907.234.174	1.478.825.980	1.676.468.474	149.087.443	97,52	93,45	94,62	91,71	92,98	8,16	25.510.185	- 287.960.162
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.881.000	40.000.000	25.200.000	25.000.000	29.500.000	27.000.000	41.405.000	32.445.925	24.894.000	22.700.000	24.273.450	5.610.000	96,56	81,11	98,79	90,80	82,28	20,78	2.600.000	- 5.367.185
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.472.000	98.820.000	145.900.000	164.500.000	208.343.909	175.247.668	94.569.500	91.181.811	141.287.190	118.258.595	117.192.002	22.167.943	91,40	92,27	96,84	71,89	56,25	12,65	15.285.534	- 13.802.774
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	157.326.400	165.000.000	169.000.000	186.570.000	202.980.000	1.000.332.000	154.386.000	161.844.500	165.476.000	182.656.000	200.054.500	99.700.000	98,13	98,09	97,91	97,90	98,56	9,97	167.066.400	- 12.428.900
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	48.220.000	30.000.000	45.800.000	50.000.000	25.400.000	-	38.131.800	29.987.200	26.059.700	38.051.900	25.309.638	-	79,08	99,96	56,90	76,10	99,64	-	6.000.000	- 5.997.440
Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.449.650	200.000.000	146.986.880	151.502.216	150.811.550,04	-	196.310.000	199.751.500	146.715.000	150.903.000	149.456.000	-	99,42	99,88	99,82	99,60	99,10	-	40.000.000	- 39.950.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	41.096.699,26	44.557.458	39.999.925	49.999.850	50.000.000	49.991.900	32.495.805	0	100,00	#####	100,00	99,98	79,07	0,00	1.088.508	- 9.999.970
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	50.925.700	36.000.000	40.000.000	20.945.000	38.000.000	10.000.000	50.823.000	35.788.000	40.000.000	20.945.000	0	100,00	99,80	99,41	100,00	100,00	0,00	2.585.140	- 10.164.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	595.130.000	707.260.000	84.000.000	44.500.000	330.524.000	360.000.000	592.960.000	638.778.524	77.345.200	42.692.000	328.700.400	3.000.000	99,64	90,32	92,08	95,94	99,45	0,83	69.452.000	- 127.155.705
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bantuan Gubernur)	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	2.849.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.200.000	5.000.000	-	2.230.000	5.900.000	60.000.000	2.951.000	4.830.000	-	2.200.000	5.318.000	0	92,22	96,60	-	98,65	90,14	0,00	11.000.000	- 966.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.000.000	16.510.000	20.000.000	11.800.000	10.945.000	19.994.000	16.252.500	15.031.400	18.441.700	11.739.000	0	99,97	85,54	91,04	92,21	99,48	0,00	1.611.000	- 3.250.500
Penyediaan Makanan dan Minuman	41.350.000	94.168.000	89.977.000	95.360.000	76.700.000	51.142.500	39.135.000	81.143.000	86.631.000	86.454.000	73.992.818	6.825.000	94,64	86,17	96,28	90,66	96,47	13,35	8.605.100	- 14.863.600
Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	180.000.000	200.000.000	100.800.000	140.000.000	74.300.000	60.500.000	177.973.319	199.815.444	100.592.684	139.089.385	74.099.516	11.784.500	98,87	99,91	99,79	99,35	99,75	19,48	27.900.000	- 37.606.189
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	-	-	-	592.800.000	592.800.000	-	-	-	-	564.487.500	592.800.000	-	-	-	-	95,22	100,00	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	13.600.000	-	14.975.000	14.850.000	19.800.000	20.750.000	12.825.000	-	99,83	99,00	99,00	83,00	94,30	-	3.000.000	- 2.970.000
Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah	11.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	18.350.000	-	5.865.000	17.185.000	14.765.000	2.150.000	7.267.345	-	53,32	68,74	59,06	8,60	39,60	-	5.000.000	- 3.437.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.359.463.950</b>	<b>1.126.280.000</b>	<b>1.346.910.557</b>	<b>450.000.000</b>	<b>472.335.250,16</b>	<b>1.494.550.000</b>	<b>1.299.903.444</b>	<b>1.010.824.350</b>	<b>1.152.410.741</b>	<b>369.596.669</b>	<b>404.069.461</b>	<b>18.548.821</b>	<b>95,62</b>	<b>89,75</b>	<b>85,56</b>	<b>82,13</b>	<b>85,55</b>	<b>1,24</b>	<b>73.654.000</b>	<b>- 198.455.106</b>
Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	90.000.000	410.000.000	618.000.000	-	-	-	83.850.000	349.509.960	500.080.000	-	-	-	93,17	85,25	80,92	-	-	-	82.000.000	- 69.901.992
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	268.993.950	250.000.000	181.146.057	47.987.840	180.395.250,16	389.750.000	267.780.000	249.770.000	180.860.000	47.917.000	180.010.000	0	99,55	99,91	99,84	99,85	99,79	0,00	27.950.000	- 49.954.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	147.290.000	220.000.000	244.474.500	250.000.000	226.000.000	204.800.000	128.583.424	166.096.390	168.897.741	171.129.669	158.159.461	18.548.821	87,30	75,50	69,09	68,45	69,98	9,06	3.040.000	- 29.509.514
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	853.180.000	46.280.000	150.000.000	152.012.160	-	290.000.000	819.690.020	45.800.000	149.950.000	150.550.000	-	-	96,07	98,96	99,97	99,04	-	-	48.744.000	- 9.160.000
Pemeliharaan taman dan lahan parkir (Bantuan Gubernur)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebeleur	-	200.000.000	153.290.000	-	65.940.000	110.000.000	-	199.648.000	152.623.000	-	65.900.000	0	-	99,82	99,56	-	99,94	0,00	18.000.000	- 39.929.600

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Tw.1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (TW.)	Anggaran	Realisasi
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>12.250.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	-	<b>110.750.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>82.530.000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>82,53</b>	-	-	-	-	<b>2.150.000</b>	<b>16.506.000</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	50.000.000	-	-	-	110.750.000	-	33.180.000	-	-	-	-	66,36	-	-	-	-	-	12.150.000	6.636.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12.250.000	50.000.000	-	-	-	-	12.250.000	49.350.000	-	-	-	-	100	98,70	-	-	-	-	10.000.000	9.870.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>174.340.000</b>	<b>265.420.000</b>	<b>171.786.300</b>	<b>203.888.766</b>	<b>105.781.406</b>	<b>502.200.000</b>	<b>163.666.000</b>	<b>253.317.425</b>	<b>170.582.721</b>	<b>194.641.443</b>	<b>104.797.487</b>	<b>31.591.693</b>	<b>93,88</b>	<b>95,44</b>	<b>99,30</b>	<b>95,46</b>	<b>99,07</b>	<b>6,29</b>	<b>47.356.000</b>	<b>44.345.146</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.380.000	160.420.000	65.699.300	81.234.300	40.081.406	373.000.000	119.901.000	151.524.000	65.117.800	78.162.043	39.861.719	23.337.000	93,40	94,45	99,11	96,22	99,45	6,26	42.516.000	25.637.400
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	13.320.000	25.000.000	32.539.000	36.500.000	16.000.000	48.000.000	12.840.000	23.925.975	32.096.000	35.275.000	15.906.000	3.210.000	96,40	95,70	98,64	96,64	99,41	6,69	4.600.000	4.143.195
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	11.320.000	30.000.000	25.000.000	26.500.000	16.000.000	31.200.000	10.840.000	28.969.950	24.839.000	25.968.000	15.343.463	5.044.693	95,76	96,57	99,36	97,99	95,90	16,17	240.000	4.785.051
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	21.320.000	50.000.000	48.548.000	59.654.466	33.700.000	50.000.000	20.085.000	48.897.500	48.529.921	55.236.400	33.686.305	0	94,21	97,80	99,96	92,59	99,96	0,00	-	9.779.500
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan</b>	<b>89.370.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>76.390.000</b>	<b>136.890.000</b>	<b>57.307.389</b>	<b>74.102.097</b>	<b>62.336.429</b>	<b>131.843.000</b>	<b>72.390.000</b>	<b>118.327.622</b>	<b>57.093.000</b>	<b>0</b>	<b>69,75</b>	<b>65,92</b>	<b>94,76</b>	<b>86,44</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.179.581</b>	<b>26.368.600</b>
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	89.370.000	200.000.000	76.390.000	136.890.000	57.307.389	74.102.097	62.336.429	131.843.000	72.390.000	118.327.622	57.093.000	0	69,75	65,92	94,76	86,44	99,63	0,00	25.179.581	26.368.600
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana (Bantuan Gubernur)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>2.971.603.000</b>	<b>2.658.788.000</b>	<b>3.099.260.700</b>	<b>913.878.000</b>	<b>777.596.391,67</b>	<b>1.290.574.630</b>	<b>2.598.802.551</b>	<b>2.470.063.876</b>	<b>2.938.433.381</b>	<b>853.245.971</b>	<b>671.418.351</b>	<b>129.126.406</b>	<b>87,45</b>	<b>92,90</b>	<b>94,81</b>	<b>93,37</b>	<b>86,35</b>	<b>10,01</b>	<b>273.642.674</b>	<b>468.187.494</b>
Penetapan RPJPD	-	-	-	137.500.000	-	-	-	-	-	103.703.500	-	-	-	-	-	75,42	-	-	-	-
Penyusunan draf/rancangan RPJMD Tahun 2016-2021	129.900.000	-	-	-	-	189.343.000	129.217.000	-	-	-	-	9.400.000	99,47	-	-	-	-	-	37.868.600	1.880.000
Revisi RPJMD Tahun 2010-2015	-	271.250.000	-	-	-	-	-	248.646.400	-	-	-	-	91,67	-	-	-	-	-	54.250.000	49.729.280
Penyelenggaraan Musrembang RPJMD	429.966.000	-	-	-	-	-	395.487.123	-	-	-	-	-	91,98	-	-	-	-	-	-	-
Penetapan RPJMD	365.446.000	-	412.290.000	-	-	250.000.000	248.291.500	-	371.190.000	-	-	57.418.590	67,94	-	-	-	-	-	50.000.000	11.483.718
Revisi Perda 8 Tahun 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan rancangan RKPD	135.318.000	226.358.000	213.650.000	252.878.000	239.949.041,19	-	129.988.000	220.378.000	206.595.000	245.250.289	196.067.651	-	96,06	97,36	96,70	96,98	81,71	-	45.271.600	44.075.600
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	618.621.000	587.880.000	592.073.200	-	-	-	584.733.875	577.454.697	591.245.200	-	-	-	94,52	98,23	99,86	-	-	-	117.576.000	115.490.939
Penetapan RKPD	252.366.000	331.400.000	243.800.000	261.500.000	157.159.000	627.917.630	199.473.471	286.668.959	219.185.000	259.922.962	145.524.500	6.900.000	79,04	86,50	89,90	99,40	92,60	1,10	59.303.526	55.953.792
Koordinasi Penyusunan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	348.000.000	650.000.000	448.933.500	-	-	-	294.876.765	592.284.445	437.707.000	-	-	-	84,73	91,12	97,50	-	-	-	130.000.000	118.456.889
Penyusunan RKPD Perubahan	236.644.000	200.000.000	124.482.000	262.000.000	161.301.000	223.314.000	212.770.000	162.066.725	113.421.000	244.369.220	143.431.400	55.407.816	89,91	81,03	91,11	93,27	88,92	24,81	4.662.800	21.331.782
Koordinasi perencanaan pembangunan	344.542.000	241.900.000	442.032.000	-	-	-	304.442.500	239.382.650	393.483.145	-	-	-	88,36	98,96	89,02	-	-	-	48.380.000	47.876.530
Pengendalian perencanaan pembangunan	-	-	206.000.000	-	-	-	-	-	202.287.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Review RPJPD	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	291.274.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan secara elektronik (emonev)	110.800.000	150.000.000	116.000.000	-	-	-	99.522.317	143.182.000	112.045.236	-	-	-	89,82	95,45	96,59	-	-	-	30.000.000	28.636.400
Penyusunan Rancangan Awal Teknokratik RPJMD 2021-2026	-	-	-	-	119.187.350	-	-	-	-	-	119.156.800	-	-	-	-	-	99,97	-	-	-
Revisi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (DID)	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	67.238.000	-	-	-	-	-	67,24	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Tw.1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (TW.)	Anggaran	Realisasi
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>376.880.000</b>	<b>466.000.000</b>	<b>294.646.500</b>	-	-	-	<b>374.617.691</b>	<b>461.777.350</b>	<b>294.440.000</b>	-	-	-	<b>99,40</b>	<b>99,09</b>	<b>99,93</b>	-	-	-	<b>93.200.000</b>	<b>92.355.470</b>
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan	136.750.000	150.000.000	104.400.000	-	-	-	135.454.074	148.524.600	104.365.000	-	-	-	99,05	99,02	99,97	-	-	-	30.000.000	29.704.920
Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial	58.810.000	66.000.000	82.800.000	-	-	-	58.630.217	65.909.450	82.672.000	-	-	-	99,69	99,86	99,85	-	-	-	13.200.000	13.181.890
Koordinasi Perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi perkotaan	181.320.000	250.000.000	107.446.500	-	-	-	180.533.400	247.343.300	107.403.000	-	-	-	99,57	98,94	99,96	-	-	-	50.000.000	49.468.660
<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>1.077.740.000</b>	<b>1.875.370.000</b>	<b>932.372.000</b>	-	-	-	<b>1.006.502.231</b>	<b>1.080.555.132</b>	<b>710.037.445</b>	-	-	-	<b>93,39</b>	<b>57,62</b>	<b>76,15</b>	-	-	-	<b>375.074.000</b>	<b>216.111.026</b>
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	319.490.000	384.305.000	-	-	-	-	317.561.621	369.214.850	-	-	-	-	99,40	96,07	-	-	-	-	76.861.000	73.842.970
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	427.250.000	341.065.000	432.372.000	-	-	-	402.386.710	339.443.282	416.035.145	-	-	-	94,18	99,52	96,22	-	-	-	68.213.000	67.888.656
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	331.000.000	400.000.000	350.000.000	-	-	-	286.553.900	371.897.000	294.002.300	-	-	-	86,57	92,97	84,00	-	-	-	80.000.000	74.379.400
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bantuan Gubernur)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pro Poor Planning and Budgeting (P3D) dan Program Perencanaan Responsif</b>		750.000.000	150.000.000	-	-	-	-	0	0	-	-	-		0,00	0,00	-	-	-	150.000.000	-
Penyusunan indikator ekonomi daerah	498.900.000	-	-	-	-	-	490.189.309	-	-	-	-	-	98,25	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>910.267.000</b>	<b>527.024.801,70</b>	<b>1.046.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>860.372.900</b>	<b>514.793.656</b>	<b>57.389.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,52</b>	<b>97,68</b>	<b>5,49</b>	<b>209.200.000</b>	<b>114.777.800</b>	
Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sektor pertanian dan pangan	-	-	-	440.000.000	148.030.600	-	-	-	413.454.275	147.921.200	-	-	-	-	93,97	99,93	-	-	-	-
Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sektor koperasi, UKM,	-	-	-	284.000.000	82.230.500	1.046.000.000	-	-	279.958.300	82.015.700	57.389.000	-	-	-	98,58	99,74	5,49	209.200.000	114.777.800	
Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sektor investasi, pariwisata,	-	-	-	186.267.000	96.763.701,70	-	-	-	166.960.325	96.505.500	-	-	-	-	89,63	99,73	-	-	-	-
Penyusunan Masterplan Konsep e-Commerce (DID)	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	188.351.256	-	-	-	-	-	94,18	-	-	-	-
<b>Program perencanaan Sosial budaya</b>	<b>591.500.000</b>	<b>975.000.000</b>	<b>1.116.104.000</b>	-	-	-	<b>523.886.000</b>	<b>971.837.072</b>	<b>857.934.350</b>	-	-	-	<b>88,57</b>	<b>99,68</b>	<b>76,87</b>	-	-	-	<b>195.000.000</b>	<b>194.367.414</b>
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	591.500.000	300.000.000	492.834.000	-	-	-	523.886.000	298.103.122	399.452.650	-	-	-	88,57	99,37	81,05	-	-	-	60.000.000	59.620.624
Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	-	675.000.000	623.270.000	-	-	-	-	673.733.950	458.481.700	-	-	-	-	99,81	73,56	-	-	-	135.000.000	134.746.790
<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.032.540.000</b>	<b>427.103.654</b>	<b>941.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.004.324.400</b>	<b>425.414.189</b>	<b>90.197.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,27</b>	<b>99,60</b>	<b>9,59</b>	<b>188.200.000</b>	<b>18.039.500</b>	
Koordinasi perencanaan pembangunan sektor kependudukan	-	-	-	233.000.000	67.659.500	534.500.000	-	-	225.530.000	67.233.300	52.287.700	-	-	-	96,79	99,37	9,78	106.900.000	10.457.540	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor pemerintahan	-	-	-	280.000.000	108.622.000	406.500.000	-	-	275.414.500	108.211.553	37.909.800	-	-	-	98,36	99,62	9,33	81.300.000	7.581.960	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor sosial	-	-	-	243.000.000	66.971.500	-	-	-	240.450.200	66.639.700	-	-	-	-	98,95	99,50	-	-	-	-
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	176.540.000	183.850.654	-	-	-	163.929.900	183.329.636	-	-	-	-	-	92,86	99,72	-	-	-
Penguatan Lembaga TKPK	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	98.999.800	-	-	-	-	-	-	99,00	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (T w 1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (T W)	Anggaran	Realisasi
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>197.350.000</b>	<b>466.430.000</b>	<b>147.942.000</b>	-	-	-	<b>196.771.975</b>	<b>420.989.550</b>	<b>147.521.000</b>	-	-	-	<b>99,71</b>	<b>90,26</b>	<b>99,72</b>	-	-	-	<b>93.286.000</b>	<b>84.197.910</b>
Dst Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)	197.350.000	184.000.000	147.942.000	-	-	-	196.771.975	180.230.925	147.521.000	-	-	-	99,71	97,95	99,72	-	-	-	36.800.000	36.046.185
Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)	-	282.430.000	-	-	-	-	-	240.758.625	-	-	-	-	-	85,25	-	-	-	-	56.486.000	48.151.725
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>150.000.000</b>	-	-	-	<b>89.970.000</b>	-	-	-	-	-	<b>89,97</b>	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian Analitis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan Sinergitas perencanaan provinsi dengan Kabupaten/Kota	100.000.000	-	150.000.000	-	-	-	89.970.000	-	0	-	-	-	89,97	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>	<b>494.580.000</b>	<b>1.185.000.000</b>	<b>1.147.500.000</b>	-	-	-	<b>487.271.180</b>	<b>1.140.654.619</b>	<b>1.108.315.500</b>	-	-	-	<b>98,52</b>	<b>96,26</b>	<b>96,59</b>	-	-	-	<b>237.000.000</b>	<b>228.130.924</b>
Investigasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan	173.040.000	225.000.000	575.000.000	-	-	-	170.389.522	555.672.570	546.445.529	-	-	-	98,47	#####	95,03	-	-	-	45.000.000	111.134.514
Penyusunan dan pengolahan SIPD	321.540.000	860.000.000	290.400.000	-	-	-	316.881.658	209.962.122	284.684.946	-	-	-	98,85	37,49	96,02	-	-	-	112.000.000	41.992.424
Penyusunan dan pengolahan SIPD	-	400.000.000	282.100.000	-	-	-	-	375.019.927	277.215.025	-	-	-	-	93,75	96,27	-	-	-	80.000.000	75.003.985
<b>Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah</b>	<b>408.903.000</b>	-	-	-	-	-	<b>381.592.377</b>	-	-	-	-	-	<b>93,32</b>	-	-	-	-	-	-	-
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	74.250.000	-	-	-	-	-	60.343.900	-	-	-	-	-	81,27	-	-	-	-	-	-	-
Pengolahan, updating dan analisis data PDRE	334.653.000	-	-	-	-	-	321.248.477	-	-	-	-	-	95,99	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>469.660.000</b>	<b>570.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	-	-	-	<b>468.156.441</b>	<b>568.740.750</b>	<b>495.998.500</b>	-	-	-	<b>100</b>	<b>99,78</b>	<b>99,20</b>	-	-	-	<b>114.000.000</b>	<b>113.748.150</b>
Penyusunan Falza dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Review RTRW Kab Bandung	-	570.000.000	-	-	-	-	-	568.740.750	-	-	-	-	-	99,78	-	-	-	-	114.000.000	113.748.150
Survey dan pemetaan	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	495.998.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi perencanaan tata ruang	469.660.000	-	-	-	-	-	468.156.441	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Perencanaan pembangunan fisik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>854.183.500</b>	<b>324.365.305,34</b>	<b>938.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>853.271.500</b>	<b>324.273.361</b>	<b>116.020.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,89</b>	<b>99,97</b>	<b>12,37</b>
Koordinasi perencanaan pembangunan sektor Lini/layanan Hidup dan Penataan	-	-	-	232.750.000	99.000.000	458.530.000	-	-	-	-	-	-	232.393.000	99.000.000	64.719.900	-	-	99,85	100,00	14,11
Koordinasi perencanaan pembangunan sektor transportasi dan SDA	-	-	-	204.750.000	73.726.000	-	-	-	-	-	-	-	204.450.000	73.684.261	-	-	-	99,85	99,94	-
Koordinasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman	-	-	-	190.750.000	79.540.000	479.670.000	-	-	-	-	-	-	190.750.000	79.459.900	51.300.400	-	-	100,00	99,94	10,69
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	-	-	-	225.933.500	72.099.305	-	-	-	-	-	-	-	225.678.500	72.099.200	-	-	-	99,89	100,00	-
<b>Program Pengembangan data/ informasi/Ke Hibangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>906.400.000</b>	<b>593.023.247</b>	<b>1.126.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>876.470.250</b>	<b>431.998.525</b>	<b>37.908.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,70</b>	<b>72,85</b>	<b>3,37</b>
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi/ kebutuhan penyusunan	-	-	-	523.000.000	93.038.000	753.000.000	-	-	-	-	-	-	504.220.750	86.804.502	23.363.000	-	-	96,41	93,30	3,10
Investigasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung Peningkatan Kerjasama Kelembagaan Kelembagaan	-	-	-	383.400.000	143.606.400	373.000.000	-	-	-	-	-	-	372.249.500	140.432.174	14.545.000	-	-	97,09	97,79	3,90
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dolaumen	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
<b>Program Pengendalian dan Evaluasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941.400.000</b>	<b>949.012.502</b>	<b>1.178.753.693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>917.633.348</b>	<b>871.493.771</b>	<b>138.237.798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,48</b>	<b>91,83</b>	<b>11,73</b>
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan secara elektronik (e-manasi)	-	-	-	140.600.000	96.455.000	444.200.000	-	-	-	-	-	-	136.847.329	93.433.500	35.393.298	-	-	97,33	96,87	7,97
Penyusunan dan Pengolahan SIPD	-	-	-	55.600.000	238.173.250	304.771.693	-	-	-	-	-	-	52.945.975	223.630.600	89.495.000	-	-	95,23	93,89	29,36
Pengendalian perencanaan pembangunan	-	-	-	207.500.000	64.980.000	429.782.000	-	-	-	-	-	-	199.685.394	50.254.050	13.349.500	-	-	96,23	77,37	3,11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	-	-	-	432.100.000	229.700.000	-	-	-	-	-	-	-	424.837.425	212.964.196	-	-	-	98,32	92,71	-
Penyusunan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	105.600.000	119.734.252	-	-	-	-	-	-	-	103.317.225	118.953.475	-	-	-	97,84	99,35	-
Penyusunan Evaluasi RUMD (DID)	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	172.252.980	-	-	-	-	86,13	-
<b>Program perencanaan pembangunan partisipatif</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749.239.000</b>	<b>491.695.394</b>	<b>710.657.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>743.303.999</b>	<b>483.358.655</b>	<b>75.315.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,21</b>	<b>98,30</b>	<b>10,60</b>
Penyelenggaraan Muren'ang RIKPD	-	-	-	432.748.000	415.487.604	710.657.000	-	-	-	-	-	-	429.236.870	407.558.310	75.315.500	-	-	99,19	98,10	10,60
Koordinasi perencanaan Pembangunan	-	-	-	316.494.000	76.207.790	-	-	-	-	-	-	-	314.067.129	75.770.345	-	-	-	99,23	99,43	-

Tabel T-C.24. merupakan tabel perbandingan penyerapan anggaran dan realisasi BAPPERIDA Tahun 2017-2021. Khusus untuk realisasi tahun 2021 didapatkan dari realisasi sampai dengan triwulan 1. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio penyerapan anggaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 di atas 80%. Selama periode Renstra tahun 2017-2021, rata-rata anggaran meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp.933.147.941,80 per tahun sedangkan untuk realisasinya sebesar -Rp. 2.483.120.421. Hasil minus tersebut dikarenakan realisasi anggaran pada tahun 2021 masih realisasi untuk triwulan I. Untuk rasio capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu dengan anggaran belanja sebesar Rp. 21.048.777.482 dan realisasi sebesar Rp. 19.918.129.210 atau dengan rasio penyerapan sebesar 94,63% sedangkan untuk rasio realisasi terendah pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 18.482.997.700 dengan realisasi sebesar Rp. 16.040.121.459 atau dengan rasio penyerapan sebesar 86.78%.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Renstra Tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang ada, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta sinergitas antar PD yang baik maupun dengan *stakeholders* lainnya. Pada tahun 2019 terdapat satu kegiatan yang tidak dapat terealisasi yaitu kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan pada program pengembangan data/informasi kelitbang yang sumber anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 150.000.000. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang disediakan atau anggaran tidak mencukupi. Realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan harga satuan barang pada saat perencanaan dan pencairan sehingga terdapat sisa atau kelebihan anggaran pada saat realisasi.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di



daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada dan pencapaian kinerja selama ini maka tantangan yang akan dihadapi dan menjadi kendala BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam pengembangan pelayanan diantaranya diantaranya yaitu:

- a. Adanya perubahan regulasi baik pusat maupun provinsi;
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Ketersediaan data yang akurat dan *real time* belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- e. manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum memadai;

Sedangkan peluang yang diharapkan mampu menjadi peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada periode Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya yaitu:

- a. Sudah tersedianya aplikasi SIPD;
  - b. Tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi (sidalmonep);
  - c. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
  - d. Tersedianya dukungan anggaran;
  - e. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
- dan

- f. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi BAPPERIDA dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi BAPPERIDA dalam melaksanakan pelayanannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 (Tabel T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
			Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi dengan optimal karena masih dalam tahap pengembangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	<p>Hasil pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan</p> <p>Ketersediaan data analisis capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal</p> <p>Tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti masih terbatas</p>
2	Hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah belum optimal	Penelitian pengembangan dan inovasi yang dilaksanakan belum didasarkan pada isu strategis	Tenaga fungsional peneliti masih terbatas

Selain permasalahan-permasalahan tersebut kendala yang dirasakan selama periode berjalan Renstra BAPPERIDA kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 diantaranya adalah adanya dinamika perubahan kebijakan Nasional berupa Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

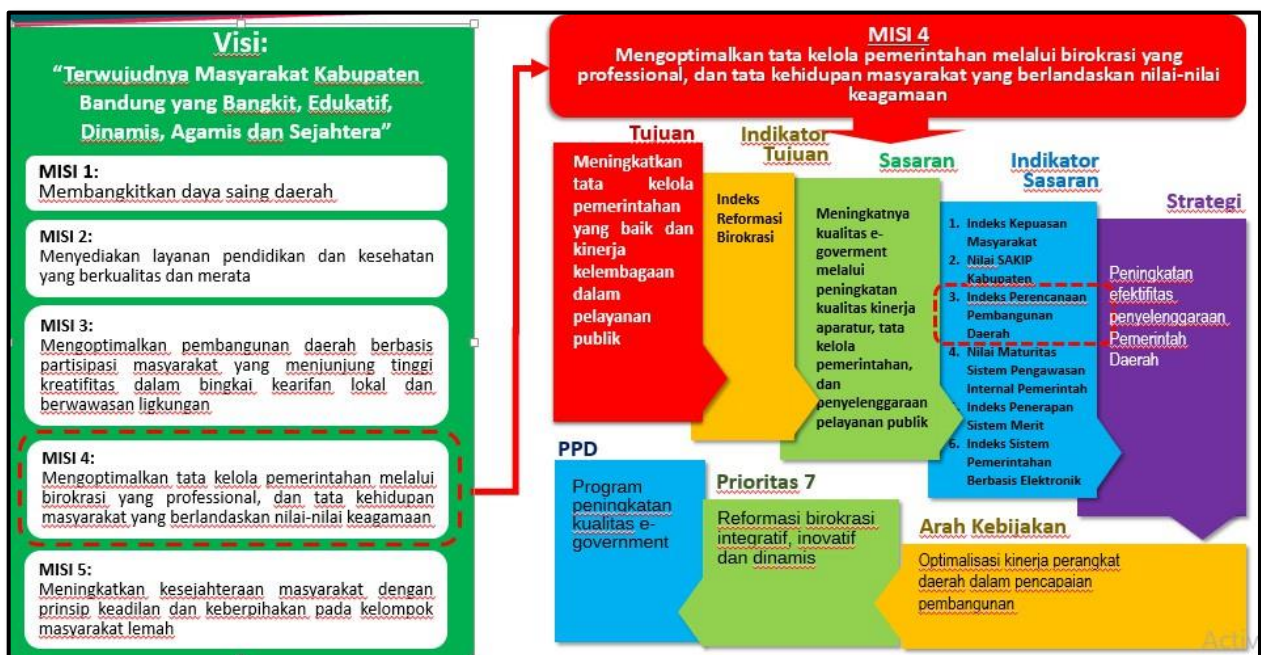
Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPERIDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”, dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangkitkan daya saing daerah;
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan;

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Dalam hal ini, BAPPERIDA Kabupaten Bandung berada dalam misi keempat yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”, dengan tujuan “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik”, indikator kinerja utama “Indeks reformasi birokrasi”, sasaran “Meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik”, dan indikator sasaran “Nilai Sakip Kabupaten” dan “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:



Hasil identifikasi BAPPERIDA tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPERIDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini. Adapun faktor-faktor penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan regulasi baik pusat maupun provinsi;
- b. Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum optimal;
- c. Masih belum optimalnya pengolahan data / informasi hasil penelitian untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Ketersediaan sarana prasarana pendukung belum merata;



- e. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian perencanaan sebelumnya yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan ke depan.
- g. Ketersediaan data yang akurat dan *real time* belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mendukung pelayanan BAPPERIDA diantaranya yaitu:

- a. Adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Adanya jaringan internet penunjang operasional komputer.
- c. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah dilegalformalkan, sehingga mempermudah alokasi dan distribusi anggaran.
- d. Tersedianya dukungan anggaran.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga**

Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik 38 Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Disamping itu peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran *Clearing House* untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema

pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

Adapun telaahan keterkaitan sasaran Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; serta
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Sasaran tersebut di atas diimplementasikan dalam arah dan kebijakan yang relevan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Kementerian PPN/ Bappenas yang tidak terlepas dari sasaran agenda Nawacita presiden. Adapun arah kebijakan dan strategi yang mendukung sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/ Bappenas adalah:

- a. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).

Kementerian PPN/Bappenas melakukan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis bukti (*evidence based planning*) yang memprioritaskan pada intervensi yang berdasarkan pada data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan serta membuat strategi dalam peningkatan pencapaian pembangunan nasional serta memperkirakan biaya dampak. Bappenas berperan sebagai *clearing house* menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap Visi dan Misi Presiden dan Prioritas Nasional.

- b. Terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan;

Kementerian PPN/Bappenas memaksimalkan fungsi pengendalian untuk memastikan rencana yang telah disusun dan disepakati terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dilakukan dengan optimalisasi system informasi yang ideal dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

- c. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional;

Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan penguatan perencanaan dan penganggaran;
- e. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/ Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Seiring dengan hal tersebut di dalam Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 telah menyebutkan bahwa sasaran untuk mencapai pembangunan tersebut adalah melalui:

1. Adanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Terpenuhinya semua aspek dalam perencanaan pembangunan yaitu aspek kualitas, proses dan pencapaian pembangunan;
3. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk mendukung dan menyiapkan bahan perencanaan.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antarsasaran dari instansi pusat dengan kabupaten/kota. Lebih lanjut sasaran tersebut dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya.

### 3.4 Telaahan Renstra Provinsi

Hasil analisis terhadap Renstra BAPPERIDA Provinsi Jawa Barat, BAPPERIDA Kabupaten perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan Sasaran Renstra BAPPERIDA Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPERIDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur BAPPERIDA	- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas	- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan	Tingkat pendidikan SDM BAPPERIDA

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPERIDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPERIDA</li> <li>- Jumlah SDM BAPPERIDA yang telah memiliki sertifikat Pengandaan Barang/Jasa masih sedikit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kewenangan BAPPERIDA.</li> <li>- Masih kurangnya pengiriman diklat struktural dan fungsional SDM BAPPERIDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mayoritas sarjana</li> </ul>
2.	Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan BAPPERIDA	Belum tersedianya SOP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan yang belum memadai.</li> <li>- Belum adanya standarisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbukaan komunikasi dan informasi.</li> <li>- Partisipasi dari berbagai stakeholders</li> </ul>
3.	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan	Belum adanya sinergitas Perencanaan yang optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persepsi yang masih berbeda dan masih munculnya ego sektoral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektoral mempunyai potensi cukup banyak dan beragam.</li> </ul>
4.	Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat	Belum adanya keseragaman data /informasi antara BPS dengan SKPD (basis satu data belum optimal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPS</li> <li>- manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keinginan bersama seluruh SKPD dalam menyamakan dan menseragamkan data yang tersedia.</li> <li>- Optimalisasi forum satu data Kabupaten Bandung</li> </ul>

### 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung yang tertera dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 adalah “Mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam

dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan”.

Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum instansi yang melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah BAPPERIDA namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, instansi yang melaksanakan penyusunan RTRW menjadi beragam di tiap daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengklasifikasikan penataan ruang sebagai sub dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari sub urusan penataan ruang adalah penyusunan RTRW.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan kata lain, penataan ruang yang merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang seharusnya diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang di dalamnya termasuk kegiatan penyusunan RTRW. Namun BAPPERIDA tidak serta merta lepas andil dalam penyusunan RTRW Kabupaten Bandung. BAPPERIDA memiliki fungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan RTRW tersebut khususnya pada bidang perencanaan pembangunan bidang fisik dan infrastruktur.

Selain penyusunan RTRW yang baik, pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009). Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana

Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD ini yaitu untuk melakukan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025. Selain itu penyusunan KLHS ini bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 Tentang RTRW
2.	Pengendalian Penataan ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 Tentang RTRW
3.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 Tentang RTRW



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masih bersifat parsial		

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah BAPPERIDA Kabupaten Bandung bertujuan sebagai upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen RPJMD dapat dikendalikan.

### 3.6 Penentuan Isu- isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu analisis isu-isu strategis merupakan langkah awal dalam perencanaan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 isu strategis Kabupaten Bandung meliputi enam kelompok besar yang didalamnya meliputi berbagai permasalahan terkait lingkungan hidup, ekonomi wilayah, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah dan kebencanaan. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu :

1. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing;
2. Belum optimalnya penerapan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan;
3. Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing;
4. Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan;
5. Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah, dan
6. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan hasil telaahan lainnya serta isu

strategis pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 maka isu strategis yang berkembang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya aparatur khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan serta peneliti yang proporsional sesuai kebutuhan ideal. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi penting sehingga dapat menunjang aktivitas kinerja BAPPERIDA dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen hasil-hasil penelitian menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan di capai BAPPERIDA, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pada tahun selanjutnya.
3. Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (core bisnis), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi BAPPERIDA yang ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini, dokumen-dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh BAPPERIDA merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana-rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum sepenuhnya dari semua sektor melainkan hanya beberapa sektor yang telah berjalan.
4. Optimalisasi hasil kajian/penelitian dan inovasi serta data – data statistik lebih bermanfaat dan informatif, dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhir-akhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan perencanaan.
5. Penyediaan data yang terintegrasi untuk perencanaan pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan informasi dan teknologi. Untuk kondisi saat ini ketersediaan data belum teroganisir dengan optimal bahkan masih terdapat data yang tidak *update/realtime*.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan menengah BAPPERIDA Kabupaten Bandung merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih. Tujuan ini dilengkapi dengan indikator sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pada akhir perencanaan.

Dalam renstra perubahan periode Tahun 2021-2026, BAPPERIDA Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-lima yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik, maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung.

Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Bandung terdiri dari dua yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPERIDA” dengan indikator tujuan “Nilai AKIP BAPPERIDA “ dan “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator tujuannya yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan spesifik untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan sasaran ini dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran yang dilayani dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kabupaten Bandung Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	97,00%	100%
			Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	96,50%	99,97%
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPEDA	Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPERIDA	81 (A)	83 (A)
			Persentase aset dalam kondisi baik	94,50%	96,30%

Tabel 4.1 di atas khusus menerangkan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 yang masih mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan tahun 2021 merupakan masa transisi Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel. 4.2 (Tabel T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
				TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-						TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Bappeda		Nilai AKIP Bapperida	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82,0	81	81,2	83,45	83,50	83,55	83,60
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja Bapperida	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82,0	81	81,2	83,45	83,50	83,55	83,60
			Persentase BMD dalam kondisi baik	94,50%	98,66%	98,68%	98,70%	98,72%	98,74%	94,50%	98,66%	98,68%	98,70%	98,72%	98,74%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan daerah	78,72%	79,42%	80,12%	80,82%	81,52%	82,22%	78,72%	79,42%	81,69%	82,29%	83,07%	83,77%
		Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	97%	97,2%	97,4%	97,6%	97,8%	98%	97%	97,2%	97,40%	97,60%	97,80%	98,00%
			Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	78,72%	79,42%	80,12%	80,82%	81,52%	82,22%	78,72%	79,42%	81,69%	82,29%	83,07%	83,77%
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
		Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	20%	30%	40%	50%	60%	70%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut kedalam Strategi dan Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan BAPPERIDA guna mencapai visi dan misi Bupati terpilih adalah dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung misi 4 (mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan).

Untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT adalah salah satu metoda yang digunakan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh suatu organisasi berdasarkan analisis faktor eksternal dan internal suatu organisasi. Pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan BAPPERIDA baik yang berasal dari faktor eksternal dan internal PD itu sendiri. Dari faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasi kemudian dipilih faktor-faktor yang memiliki nilai strategis yang akan digunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.



**Tabel 5.1 Identifikasi dan Analisis Faktor Internal dan Eksternal Lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung**

	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>Internal</b>	<b>Strength</b>	<b>Weakness</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivasi, komitmen dan sinergitas antar bidang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu</li> <li>• Sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung sudah memadai</li> <li>• Keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel</li> <li>• Data dan informasi pembangunan relatif tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SDM perencana handal yang terbatas dan belum tersebar secara merata</li> <li>• Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masih terkendala faktor ego sektoral</li> <li>• Pemanfaatan dalam penggunaan aset yang ada masih blm optimal</li> <li>• Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>• Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan</li> </ul>
<b>Eksternal</b>	<b>Opportunity</b>	<b>Threat</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergitas antara BAPPERIDA dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan</li> <li>• Adanya aplikasi <i>e-planning</i> (Simda Integrated) dan SIPD sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi.</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan yang tersedia</li> <li>• Perkembangan teknologi informasi cukup pesat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen pengelolaan basis data dan informasi dari Perangkat Daerah belum optimal</li> <li>• Aplikasi perencanaan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak <i>trial and error</i> dalam penggunaannya sehingga belum optimal dalam implementasinya</li> <li>• Adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan</li> <li>• Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang</li> </ul>

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal (*strength* dan *weakness*) serta faktor eksternal (*opportunity* dan *treat*) tersebut di atas maka dilakukan pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal tersebut sehingga diperoleh strategi dan arah kebijakan yang strategis untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Tahun 2021-2026. Hasil pemetaan atau interaksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 di bawah ini

:

**Tabel 5.2 Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal BAPPERIDA Kabupaten Bandung**

<p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strengths (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi, komitmen dan sinergitas antar bidang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu</li> <li>2. Sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung sudah memadai</li> <li>3. Keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah</li> <li>4. Pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel</li> <li>5. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Weakness (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen waktu dan penentuan skala prioritas dalam penyelesaian pekerjaan belum optimal</li> <li>2. Jumlah SDM perencana handal yang terbatas dan belum tersebar secara merata</li> <li>3. Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masih terkendala faktor ego sektoral</li> <li>4. Pemanfaatan dalam penggunaan aset yang ada masih blm optimal</li> <li>5. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>6. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Opportunities (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas antara BAPPERIDA dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan</li> <li>2. Adanya aplikasi <i>e-planning</i> (Simda Integrated) dan SIPD sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi.</li> <li>3. Peraturan Perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan yang tersedia</li> <li>4. Perkembangan teknologi informasi cukup pesat</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>S-O (Upaya Kooperatif)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sinergitas dan komitmen antara BAPPERIDA dan OPD mitra dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang selaras, berkualitas dan tepat waktu</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi serta aplikasi perencanaan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan teknologi dan informasi bagi sumber daya aparatur</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>W-O (Rasionalisasi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoptimalan sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan Perangkat Daerah dengan program prioritas daerah</li> <li>2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi perencanaan yang ada (<i>e-Monev</i>)</li> <li>3. Optimalisasi penggunaan aplikasi <i>e-planning</i> sehingga semua rangkaian proses perencanaan sudah sesuai dengan alur dan rencana (konsisten).</li> </ol>

<b>Threats (Ancaman)</b>	<b>S-T (keuntungan mobilitas)</b>	<b>W-T (<i>status qou</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen pengelolaan basis data dan informasi dari Perangkat Daerah belum optimal</li> <li>2. Aplikasi perencanaan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak <i>trial and error</i> dalam penggunaannya sehingga belum optimal dalam implementasinya</li> <li>3. Adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan</li> <li>4. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan basis satu data Kabupaten Bandung demi keseragaman data perencanaan yang ada</li> <li>2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang memiliki kapabilitas dalam penguasaan teknologi dan informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dari setiap perangkat daerah sebagai bahan proses perencanaan pembangunan selanjutnya</li> </ol>

Adapun perumusan strategi dan arah kebijakan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.3 di bawah ini :

**Tabel 5.3 (Tabel T-C. 26)  
Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera</b>			
<b>MISI : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i>	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
		Memberikan kesempatan sumber daya aparatur untuk mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan kapabilitas dalam bidang perencanaan	Mengikuti diklat atau pelatihan teknis
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan fungsi koordinasi internal dan eksternal serta konsistensi atau keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan Perangkat Daerah dengan program prioritas daerah
		Meningkatkan standar mutu perencanaan melalui pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan	Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan  Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), <i>e-Planning</i> , dan <i>e-Monev</i>

**VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera**

**MISI : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perencanaan pembangunan	Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi ( <i>e-Monev</i> )
			Melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja di semua sektor/bidang
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Mengadakan penelitian/ kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Melaksanakan penelitian/kajian yang didasarkan pada isu-isu strategis
		Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi	Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah
			Meningkatkan kualitas penelitian/kajian dan inovasi untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
			Memfasilitasi pengembangan inovasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah

Selain menaungi urusan perencanaan, BAPPERIDA juga menaungi urusan kelitbangan. Hal tersebut sudah terakomodir dalam tujuan dan sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Salah satu sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan dengan indikator sasaran presentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara eksplisit tercantum pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Adapun proyeksi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 5.4.

**Tabel 5.4 Timeline Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Urusan Pemerintahan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	20 %	30%	40%	50%	60%	70%
	-Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	96%	100%	100%	100%	100%	100%
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPERIDA yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan BAPPERIDA yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1(Tabel T-C. 27)**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**BAPPERIDA Kabupaten Bandung**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase	- Nilai AKIP  - Persentase BMD dalam kondisi baik	- 81  - 94,50 %	- 81,2 - 98,66	Point % %	13.792.145.000,00	- 83,45 - 98,68	Point % %	15.719.589.715,00	- 83,50 - 98,70	Point % %	17.232.156.545,00	- 83,55 - 98,72	Point % %	22.098.812.048,00	- 83,60 - 98,74	Point % %	16.098.812.048,00	- 83,60 - 98,74	Point % %	84.921.515.356,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100	%	457.500.000,00	100	%	292.500.000,00	100	%	123.000.000,00	100	%	437.500.000,00	100	%	227.500.000,00	100	%	1.518.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3	Dok	292.500.000,00	2	Dok	200.000.000,00	2	Dok	75.000.000,00	3	Dok	282.500.000,00	2	Dok	90.000.000,00	12	Dok	940.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	7.500.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	10	Dok	37.500.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	1.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	10	Dok	31.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD																					
X	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	1.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	10	Dok	31.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	1.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	10	Dok	31.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	2	Laporan	50.000.000,00	2	Laporan	25.000.000,00	2	Laporan	10.000.000,00	2	Laporan	50.000.000,00	2	Laporan	40.000.000,00	10	Laporan	175.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	1	Laporan	75.000.000,00	1	Laporan	45.000.000,00	1	Laporan	30.000.000,00	1	Laporan	75.000.000,00	1	Laporan	47.500.000,00	5	Laporan	272.500.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	2	Dokumen	10.000.000,00	Bapperida	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah											3	Data	5.000.000,00	3	Data	5.000.000,00	6	Data	10.000.000,00	Bapperida	
X	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	100%	100	%	10.796.947.000,00	100	%	13.101.625.715,00	100	%	13.059.954.200,00	100	%	13.103.614.048,00	100	%	13.103.614.048,00	100	%	63.165.755.011,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	51	Orang/Bulan	10.730.947.000,00	51	Orang/Bulan	13.030.625.715,00	51	Orang/Bulan	12.994.954.200,00	51	Orang/Bulan	13.037.614.048,00	51	Orang/Bulan	13.037.614.048,00	255	Orang/Bulan	62.831.755.011,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	0,00	12	Dok	11.000.000,00	12	Dok	10.000.000,00	12	Dok	11.000.000,00	12	Dok	11.000.000,00	48	Dok	43.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Dok	2	Dok	36.000.000,00	2	Laporan	20.000.000,00	2	Laporan	20.000.000,00	2	Laporan	20.000.000,00	2	Laporan	20.000.000,00	10	Laporan	116.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
X	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	0,00	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	8	Dok	40.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung	
X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dok	12	Dok	20.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00	12	Laporan	15.000.000,00	12	Laporan	15.000.000,00	12	Laporan	15.000.000,00	60	Laporan	85.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	1	Dok	10.000.000,00	5	Dok	50.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>66.000.000,00</b>	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	-	-	0,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	5.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	30.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	-	-	0,00	1	Laporan	16.000.000,00	1	Laporan	5.000.000,00	1	Laporan	5.000.000,00	1	Laporan	10.000.000,00	4	Laporan	36.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
<b>X</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>368.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>753.500.000,00</b>	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	79 Stel	1	Paket	40.000.000,00	1	Paket	20.000.000,00	1	Paket	15.000.000,00	1	Paket	38.500.000,00	1	Paket	20.000.000,00	5	Paket	133.500.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	-	-	0,00	1	Dokumen	15.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	45.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	-	-	0,00	1	Dokumen	15.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	45.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	-	-	0,00	1	Dokumen	15.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	45.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	10	Orang	50.000.000,00	10	Orang	30.000.000,00	10	Orang	20.000.000,00	10	Orang	300.000.000,00	10	Orang	85.000.000,00	50	Orang	485.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
<b>X</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>679.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>574.952.500,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>950.860.845,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>914.229.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>384.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.503.042.345,00</b>	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Jenis	1	Paket	20.000.000,00	1	Paket	23.952.500,00	1	Paket	25.000.000,00	1	Paket	18.100.000,00	1	Paket	20.000.000,00	5	Paket	107.052.500,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Jenis	1	Paket	420.000.000,00	1	Paket	284.000.000,00	1	Paket	404.764.345,00	1	Paket	450.000.000,00	1	Paket	100.000.000,00	5	Paket	1.658.764.345,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	1	Paket	10.000.000,00	1	Paket	3.000.000,00	1	Paket	3.000.000,00	1	Paket	16.129.000,00	1	Paket	10.000.000,00	5	Paket	42.129.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan	3 Jenis	1	Paket	20.000.000,00	1	Paket	20.000.000,00	1	Paket	100.000.000,00	1	Paket	100.000.000,00	1	Paket	50.000.000,00	5	Paket	290.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	1	Paket	40.000.000,00	1	Paket	25.000.000,00	1	Paket	30.096.500,00	1	Paket	25.000.000,00	1	Paket	30.000.000,00	5	Paket	150.096.500,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Jenis	1	Dok	24.000.000,00	1	Dok	74.000.000,00	1	Dok	235.000.000,00	1	Dok	35.000.000,00	1	Dok	24.000.000,00	5	Dok	392.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Box	12	Laporan	50.000.000,00	12	Laporan	50.000.000,00	12	Laporan	50.000.000,00	12	Laporan	50.000.000,00	12	Laporan	50.000.000,00	60	Laporan	250.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Hok	12	Laporan	95.000.000,00	12	Laporan	95.000.000,00	12	Laporan	103.000.000,00	12	Laporan	220.000.000,00	12	Laporan	100.000.000,00	60	Laporan	613.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
<b>X</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>870.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.130.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	820.000.000,00	1	Unit	1.000.000.000,00	1	Unit	30.000.000,00	4	Unit	1.850.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Pengadaan Mebel	Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Jenis	1	Paket	0,00	1	Paket	0,00	1	Paket	50.000.000,00	1	Paket	100.000.000,00	1	Paket	50.000.000,00	5	Paket	200.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	0	0	unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	15.000.000,00	1	Unit	10.000.000,00	4	Unit	25.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
	Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Disediakan																					
X	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	15.000.000,00	1	Unit	10.000.000,00	4	Unit	25.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.373.698.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.254.511.500,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.708.341.500,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.089.969.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.693.698.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>8.120.218.000,00</b>	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.563 Buah	12	Laporan	20.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00	12	Laporan	5.000.000,00	12	Laporan	5.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00	60	Laporan	70.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12	Laporan	161.944.000,00	12	Laporan	142.751.500,00	12	Laporan	215.741.500,00	12	Laporan	205.774.000,00	12	Laporan	201.944.000,00	60	Laporan	928.155.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12	Laporan	1.191.754.000,00	12	Laporan	1.091.760.000,00	12	Laporan	1.487.600.000,00	12	Laporan	1.879.195.000,00	12	Laporan	1.471.754.000,00	60	Laporan	7.122.063.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
X	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>395.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>445.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.045.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>435.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5.695.000.000,00</b>	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
	<b>Daerah</b>																							
X	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	24	Unit	245.000.000,00	24	Unit	175.000.000,00	24	Unit	145.000.000,00	24	Unit	145.000.000,00	24	Unit	145.000.000,00	120	Unit	855.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20	Unit	50.000.000,00	20	Unit	50.000.000,00	20	Unit	50.000.000,00	20	Unit	50.000.000,00	20	Unit	50.000.000,00	100	Unit	250.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1	Unit	100.000.000,00	1	Unit	0,00	1	Unit	130.000.000,00	1	Unit	250.000.000,00	1	Unit	100.000.000,00	5	Unit	580.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	Unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	0,00	1	Unit	3.300.000.000,00	1	Unit	20.000.000,00	4	Unit	3.320.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
X	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Unit	0,00	1	Unit	150.000.000,00	1	Unit	120.000.000,00	1	Unit	300.000.000,00	1	Unit	120.000.000,00	4	Unit	690.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase	Capaian nilai PPD	86,50 %	87,6 %		2.649.984.000,00	88,7 %		2.061.423.522,00	89,8 %		3.489.311.005,00	90,9 %		3.405.096.000,00	92 %		2.828.130.200,00	92 %		14.580.144.727,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan  - Persentase berita acara yang disahkan	100%	100 %		1.526.231.000,00	100 %		1.191.291.522,00	100 %		2.198.084.800,00	100 %		2.014.343.000,00	100 %		1.526.231.000,00	100 %		8.456.181.322,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	1 Dok		273.314.000,00	1 Dok		164.163.722	1 Dok		423.314.000,00	2 Dok		400.000.000,00	1 Dok		273.314.000,00	6 Dok		1.534.105.722,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Telaahan dok. DAK, Bankeu Prov, DID, DBHCHT)	3 Dok	3 Dok		114.343.000,00	3 Dok		52.583.000			0,00			114.343.000,00			0,00	6 Dok		281.269.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00			0,00	3 Dok		114.343.000,00	3 Dok			3 Dok		114.343.000,00	9 Dok		228.686.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Keg	1	Dok	250.000.000,00	1	Berita Acara	172.756.000	1	Berita Acara	331.853.800,00	2	Berita Acara	400.000.000,00	1	Berita Acara	250.000.000,00	6	Berita Acara	1.404.609.800,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (BA. PD Kewilayahan dan BA Lintas PD)	1 Keg	1	Dok	200.000.000,00	1	Berita Acara	135.100.000			0,00			200.000.000,00			0,00	2	Berita Acara	535.100.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
		Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0,00			0,00	1	Berita Acara	200.000.000,00	1	Berita Acara		1	Berita Acara	200.000.000,00	3	Berita Acara	400.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Keg	1	Dok	420.657.000,00	1	Berita Acara	398.771.800	1	Berita Acara	620.657.000,00	2	Berita Acara	500.000.000,00	1	Berita Acara	420.657.000,00	6	Berita Acara	2.360.742.800,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	2	Dok	267.917.000,00	2	Dok	267.917.000	2	Dok	507.917.000,00	3	Dok	400.000.000,00	2	Dok	267.917.000,00	11	Dok	1.711.668.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase</b>	<b>- Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanakan di perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>609.553.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>559.553.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>609.553.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>609.553.000,00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.894.412.000,00</b>	Bappelitbangda	Kab. Bandung



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan	- Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	3	Masukan	146.200.000,00	3	Masukan	105.274.500			0,00					0,00	6	Masukan	397.674.500,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung	
		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				0,00			0,00	3	Dok	101.200.000,00	3	Dok	146.200.000,00	3	Dok	146.200.000,00	9	Dok	393.600.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Orang	- Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi	1 Dok	68	Orang	333.582.000,00	68	Orang	161.339.335	68	Orang	283.582.000,00	68	Orang	333.582.000,00	68	Orang	333.582.000,00	272	Orang	1.445.667.335,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
					2	Aplikasi		2	Aplikasi		2	Aplikasi		2	Aplikasi		2	Aplikasi		10	Aplikasi			
5	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Dok	1	Buku	129.771.000,00	1	Buku	93.386.165	1	Buku	174.771.000,00	1	Buku	129.771.000,00	1	Buku	129.771.000,00	5	Buku	657.470.165,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	95%	95,2	%	514.200.000,00	95,4	%	337.000.000,00	95,6	%	553.527.005,00	95,8	%	581.200.000,00	96	%	514.200.000,00	96	%	2.500.127.005,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dok	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	119.887.600	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	231.200.000,00	5	Laporan	1.044.687.600,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dok	2	Laporan	283.000.000,00	2	Laporan	217.112.400	2	Laporan	322.327.005,00	2	Laporan	350.000.000,00	2	Laporan	283.000.000,00	10	Laporan	1.455.439.405,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase	Persentase ketersediaan dokumen SIPD	N/A			0,00	100	%	173.132.000,00	100	%	178.146.200,00	100	%	200.000.000,00	100	%	178.146.200,00	100	%	729.424.400,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota	N/A			0,00	1	Dokumen	173.132.000	1	Dokumen	178.146.200,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	178.146.200,00	4	Dokumen	729.424.400,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase	- Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD	100%	97,2	%	2.602.700.000,00	97,4	%	1.989.000.000,00	97,6	%	2.577.700.000,00	97,8	%	2.674.500.000,00	98	%	2.674.500.000,00	98	%	12.518.400.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup	99 %  74 %	97,2	%	864.500.000,00	97,4	%	632.000.000,00	97,6	%	864.500.000,00	97,8	%	892.500.000,00	98	%	892.500.000,00	98	%	4.146.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																					
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1	Dok	172.000.000,00	1	Dok	91.500.000			0,00			0,00			0,00	2	Dok	263.500.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
		Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							1	Dok	197.785.700,00	2	Dok	200.000.000,00	1	Dok	200.000.000,00	4	Dok	597.785.700,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung	
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen	1 Dok	38	Perangkat Daerah	118.500.000,00	38	Perangkat Daerah	58.000.000			0,00			0,00			0,00	76	Perangkat Daerah	176.500.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																					
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			0,00			0,00	38	Laporan	125.813.000,00	38	Laporan	118.500.000,00	38	Laporan	118.500.000,00	114	Laporan	362.813.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung	
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dok	1	Laporan	97.500.000,00	1	Laporan	59.000.000	1	Laporan	72.789.500,00	1	Laporan	97.500.000,00	1	Laporan	97.500.000,00	5	Laporan	424.289.500,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1	Dok	259.000.000,00	1	Dok	318.000.000	1	Dok	249.413.000,00	2	Dok	259.000.000,00	1	Dok	259.000.000,00	6	Dok	1.344.413.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	11	Perangkat Daerah	122.500.000,00	11	Perangkat Daerah	53.500.000			0,00			0,00			0,00	22	Perangkat Daerah	176.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00			0,00	11	Laporan	128.159.100,00	11	Laporan	122.500.000,00	11	Laporan	122.500.000,00	33	Laporan	373.159.100,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	11	Perangkat Daerah	95.000.000,00	11	Perangkat Daerah	52.000.000			0,00			0,00			0,00	22	Perangkat Daerah	147.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00			0,00	11	Laporan	90.539.700,00	11	Laporan	95.000.000,00	11	Laporan	95.000.000,00	33	Laporan	280.539.700,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA	100%	97,2	%	871.000.000,00	97,4	%	702.000.000,00	97,6	%	846.000.000,00	97,8	%	871.000.000,00	98	%	871.000.000,00	98	%	4.161.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
					97,2	%		97,4	%		97,6	%		97,8	%		98	%		98	%			
					97,2	%		97,4	%		97,6	%		97,8	%		98	%		98	%			
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1	Dok	109.000.000,00	1	Dok	182.000.000	1	Dok	109.000.000,00	2	Dok	109.000.000,00	1	Dok	109.000.000,00	6	Dok	618.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Dok	8	Perangkat Daerah	195.459.000,00	8	Perangkat Daerah	141.900.000			0,00			0,00			0,00	16	Perangkat Daerah	337.359.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00			0,00	8	Laporan	170.459.000,00	8	Laporan	195.459.000,00	8	Laporan	195.459.000,00	24	Laporan	561.377.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0	8	Perangkat Daerah	163.650.000,00	8	Perangkat Daerah	73.000.000			0,00			0,00			0,00	16	Perangkat Daerah	236.650.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00			0,00	8	Laporan	163.650.000,00	8	Laporan	163.650.000,00	8	Laporan	163.650.000,00	24	Laporan	490.950.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	1	Dok	109.000.000,00	1	Dok	82.000.000	1	Dok	109.000.000,00	2	Dok	109.000.000,00	1	Dok	109.000.000,00	6	Dok	518.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0	8	Perangkat Daerah	127.541.000,00	8	Perangkat Daerah	138.100.000			0,00			0,00			0,00	16	Perangkat Daerah	265.641.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0,00			0,00	8	Laporan	127.541.000,00	8	Laporan	127.541.000,00	8	Laporan	127.541.000,00	24	Laporan	382.623.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0	8	Perangkat Daerah	166.350.000,00	8	Perangkat Daerah	85.000.000			0,00			0,00			0,00	16	Perangkat Daerah	251.350.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan				0,00			0,00	8	Laporan	166.350.000,00	8	Laporan	166.350.000,00	8	Laporan	166.350.000,00	24	Laporan	499.050.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																					
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	1. Persentase keselarasan muatan RKPd dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPd lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPd lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	97,2	%	867.200.000,00	97,4	%	655.000.000,00	97,6	%	867.200.000,00	97,8	%	911.000.000,00	98	%	911.000.000,00	98	%	4.211.400.000,00	Bappeda	Kab. Bandung
					97,2	%		97,4	%		97,6	%		97,8	%		98	%		98	%			
					97,2	%		97,4	%		97,6	%		97,8	%		98	%		98	%			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1	Dok	171.100.000,00	1	Dok	155.000.000	1	Dok	171.100.000,00	2	Dok	200.000.000,00	1	Dok	200.000.000,00	6	Dok	897.200.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Dok	8	Perangkat Daerah	100.000.000,00	8	Perangkat Daerah	117.000.000			0,00			0,00			0,00	16	Perangkat Daerah	217.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0,00			0,00	8	Laporan	100.000.000,00	8	Laporan	100.000.000,00	8	Laporan	100.000.000,00	24	Laporan	300.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Dok	8	Perangkat Daerah	162.430.000,00	8	Perangkat Daerah	140.000.000			0,00			0,00			0,00	16	Perangkat Daerah	302.430.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			0,00			0,00	8	Laporan	162.430.000,00	8	Laporan	162.430.000,00	8	Laporan	162.430.000,00	24	Laporan	487.290.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	185.100.000,00	1 Dok	95.000.000	1 Dok	185.100.000,00	2 Dok	200.000.000,00	1 Dok	200.000.000,00	6 Dok	865.200.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung					
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Dok	8 Perangkat Daerah	123.000.000,00	8 Perangkat Daerah	68.000.000		0,00		0,00			0,00	16 Perangkat Daerah	191.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung				
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			0,00			0,00	8	Laporan	123.000.000,00	8	Laporan	123.000.000,00	8	Laporan	123.000.000,00	24	Laporan	369.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung





Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			an dan pengkajian peraturan																					
5	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dok	1	Laporan	253.000.000,00	1	Laporan	843.208.000	1	Laporan	378.000.000,00	1	Laporan	378.000.000,00	1	Laporan	378.000.000,00	5	Laporan	2.230.208.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-	100	%	0,00	100	%	528.540.000,00	100	%	292.000.000,00	100	%	992.000.000,00	100	%	992.000.000,00	100	%	1.404.540.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	0	Dok	0,00	1	Dok	528.540.000	1	Dok	292.000.000,00	1	Dok	292.000.000,00	1	Dok	292.000.000,00	4	Dok	1.404.540.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida	
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida	
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
			Partisipasi Masyarakat																					
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	96%	100	%	305.000.000,00	100	%	1.453.436.000,00	100	%	2.039.000.000,00	100	%	1.742.357.060,00	100	%	1.742.357.060,00	100	%	7.282.150.120,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dok	1	Dok	205.000.000,00	1	Dok	673.786.000	1	Dok	250.000.000,00	1	Dok	132.623.000,00	1	Dok	132.623.000,00	5	Dok	1.394.032.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		0	Dok	0,00	1	Dok	0,00	1	Dok	289.000.000,00	1	Dok	173.149.000,00	1	Dok	173.149.000,00	4	Dok	635.298.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	0	Dok	0,00	1	Dok	0,00	1	Dok	292.000.000,00	1	Dok	189.060.860,00	1	Dok	189.060.860,00	4	Dok	670.121.720,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	0	Dok	0,00	1	Dok	363.150.000	1	Dok	292.000.000,00	1	Dok	103.394.000,00	1	Dok	103.394.000,00	4	Dok	861.938.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	111.000.000,00	1	Dok	111.000.000,00	2	Dok	222.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	0	Dok	0,00	1	Dok	0,00	1	Dok	292.000.000,00	1	Dok	168.264.600,00	1	Dok	168.264.600,00	4	Dok	628.529.200,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	116.000.000,00	1	Dok	116.000.000,00	2	Dok	232.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	116.000.000,00	1	Dok	116.000.000,00	2	Dok	232.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	116.000.000,00	1	Dok	116.000.000,00	2	Dok	232.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	116.000.000,00	1	Dok	116.000.000,00	2	Dok	232.000.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	0	Dok	0,00	1	Dok	166.500.000	1	Dok	374.000.000,00	1	Dok	157.095.600,00	1	Dok	157.095.600,00	4	Dok	854.691.200,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan										1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	100.000.000,00	2	Dok	200.000.000,00	Bapperida		
5	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dok	1	Dok	100.000.000,00	1	Dok	250.000.000	1	Dok	250.000.000,00	1	Dok	143.770.000,00	1	Dok	143.770.000,00	5	Dok	887.540.000,00	Bappelitbangda	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
5	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	96%	100	%	293.000.000,00	100	%	1.175.000.000,00	100	%	1.292.000.000,00	100	%	888.642.940,00	100	%	888.642.940,00	100	%	4.537.285.880,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1	Dok	293.000.000,00	1	Dok	1.175.000.000	1	Dok	392.000.000,00	1	Dok	292.000.000,00	1	Dok	292.000.000,00	5	Dok	2.444.000.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung
5	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			0,00			0,00	1	Laporan	300.000.000,00	1	Laporan	219.613.300,00	1	Laporan	219.613.300,00	3	Laporan	739.226.600,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung	
5	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			0,00			0,00	1	Laporan	300.000.000,00	1	Laporan	217.700.000,00	1	Laporan	217.700.000,00	3	Laporan	735.400.000,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung	
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			0,00			0,00	1	Laporan	300.000.000,00	1	Laporan	159.329.640,00	1	Laporan	159.329.640,00	3	Laporan	618.659.280,00	Bappeditbangda	Kab. Bandung	
						6.103.684.000,00			8.050.607.522,00			10.068.011.005,00			10.080.596.000,00			9.503.630.200,00			42.552.728.727,00			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
						19.895.829.000,00			23.770.197.237,00			27.300.167.550,00			32.179.408.048,00			25.602.442.248,00			127.474.244.083,00		



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam lima tahun mendatang yaitu untuk mendukung pencapaian misi ke-4 Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”, dengan tujuan “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik”, indikator kinerja utama “Indeks reformasi birokrasi”, sasaran “Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik”, dan indikator sasaran “Nilai Sakip Kabupaten” dan “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Secara umum, indikator kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1 (Tabel T-C. 28)**  
**Indikator Kinerja BAPPERIDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai akuntabilitas kinerja Bappeda	81 (A)	81,2 (A)	83,45 (A)	83,50 (A)	83,55 (A)	83,6 (A)	83,6 (A)
2	Persentase BMD dalam kondisi baik	94,50%	98,66%	98,68%	98,70%	98,72%	98,74%	98,74%
3	Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	97%	97,2%	97,4%	97,6%	97,8%	98%	98%
4	Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	78,72%	79,42%	81,69%	82,29%	83,07%	83,77%	83,77%

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Presentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan. Perubahan Renstra ini telah menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada sisa dua tahun periode terakhir.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional

Soreang, Januari 2024  
KEPALA BAPPERIDA,

ttd

ERWIN RINALDI  
NIP. 19671110 199303 1 012

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

